



IMPLEMENTASI SISTEM E-RETRIBUSI PADA PASAR SAYUR DI KABUPATEN MAGETAN

Yosfanda Kusuma Wardhana¹, Tjitjik Rahaju², Suci Megawati³, Ahmad Nizar Hilmi⁴

¹⁻⁴Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received: October 2026

Revised: October 2026

Accepted: October 2026

Available October 2026

¹24040674397@mhs.unesa.ac.id,

²tjitjikrahaju@unesa.ac.id,

³sucimegawati@unesa.ac.id,

⁴ahmadhilmi@unesa.ac.id



*This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) license.*

*Copyright © 2023 by Author. Published
by Universitas Pendidikan Ganesha.*

Abstrak

Permasalahan dalam Implementasi E-Retribusi pada Pasar Sayur di Kabupaten Magetan terletak pada adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam penerapan pembayaran retribusi secara digital oleh pedagang. Ketidaksesuaian tersebut terlihat masih adanya praktik pembayaran secara konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem e-retribusi pada Pasar Sayur di Kabupaten Magetan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis implementasi kebijakan menggunakan perspektif George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator komunikasi berjalan dengan cukup baik, didukung oleh sosialisasi, penyampaian informasi secara berjenjang, serta pendampingan kepada pedagang. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata karena adanya perbedaan literasi digital dan usia pedagang. Indikator

sumber daya berjalan cukup baik namun belum optimal. Karena terkendala kemampuan literasi digital, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet, belum ada sistem yang terintegritas, serta keterbatasan anggaran. Indikator disposisi menunjukkan hasil yang baik, pelaksana dan penerima manfaat menunjukkan sikap dan komitmen positif terhadap kebijakan e-retribusi. Indikator struktur birokrasi telah berjalan cukup baik didukung oleh SOP, pembagian tugas, koordinasi, dan pengawasan berjenjang. Dengan demikian, implementasi e-retribusi telah memberikan dukungan terhadap pengelolaan retribusi pasar yang lebih tertib dan terpantau, tetapi masih diperlukan penguatan literasi digital pedagang, peningkatan kualitas jaringan dan sarana pendukung, serta pengembangan sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas implementasi e-retribusi.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, E-Retribusi, Pasar Sayur Magetan.



Abstract

The issue regarding the implementation of the e-levy (e-retribusi) system at the Vegetable Market in Magetan Regency lies in the discrepancy between established policy and actual field conditions, specifically concerning the adoption of digital levy payments by vendors. This discrepancy is evidenced by the continued practice of conventional (cash-based) payments. This study aims to analyze the implementation of the e-levy system at the Vegetable Market in Magetan Regency and to identify the factors that facilitate or hinder its execution. A qualitative research method with a descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. The policy implementation analysis is based on the framework of George C. Edwards III, covering four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the communication dimension has functioned reasonably well, supported by outreach efforts, tiered information dissemination, and direct assistance provided to vendors; however, implementation remains uneven due to variations in digital literacy and the age of the vendors. The resource dimension has performed adequately but not optimally, constrained by limited digital literacy, insufficient infrastructure and internet connectivity, the lack of an integrated system, and budgetary limitations. The disposition dimension shows positive results, with both implementers and beneficiaries demonstrating a favorable attitude and commitment toward the e-levy policy. The bureaucratic structure dimension has also functioned well, supported by Standard Operating Procedures (SOPs), clear division of tasks, coordination, and tiered supervision. In conclusion, while the e-levy system has contributed to more organized and monitored market levy management, further improvements are required—specifically in enhancing vendors' digital literacy, upgrading network quality and supporting infrastructure, and developing an integrated system—to increase the overall effectiveness and accountability of the e-levy implementation.

Keywords: Implementation, Policy, E-Retribution, Magetan Vegetable Market.

PENDAHULUAN

Digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola. Dalam pengelolaan pasar daerah, digitalisasi dapat diterapkan pada pemungutan retribusi melalui sistem pembayaran non-tunai atau e-retribusi. Sistem ini diharapkan dapat membantu memastikan transaksi tercatat dengan benar, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, meminimalisir potensi kebcoran dan mempermudah pemantauan penerimaan (Putri dkk., 2025).

Implementasi sistem tersebut diperkuat melalui berbagai regulasi pemerintah, termasuk Kepres No. 3 2021 dan Kepbup Magetan No. 134 2021, menjelaskan tentang pembentukan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD). Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengembangkan digitalisasi melalui sistem e-retribusi pelayanan pasar. Implementasinya mengalami perubahan, mulai dari sistem upload pada 2019-2020, e-circle pada 2020-2023, hingga pembayaran melalui QRIS sejak 2024 sampai dengan sekarang.

Sistem QRIS memungkinkan pedagang membayar dengan memindai kode, sementara penerimaan dapat dipantau melalui aplikasi Customer's Self Services (CSS) Bank Jatim dan pembukuan dilakukan secara daring melalui Google Sheet.

Meskipun sistem QRIS telah diterapkan di pasar daerah, pada pratiknya pembayaran belum seluruhnya dilakukan melalui mekanisme digital. Sebagian praktik konvensional masih ditemukan di Pasar Sayur Magetan. Selain itu, perubahan mekanisme e-retribusi, minimnya kemampuan digital pedagang, dan sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi

menjadi kendala. Keadaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik pelaksanaan di lapangan.

Berbagai penelitian terdahulu menyampaikan bahwa penggunaan e-retribusi dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas penerimaan (Pramesti, 2023; Prabowo dan Marwah, 2023; Pangarso, 2024). Namun penelitian lain menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi, ketersediaan infrastruktur, sosialisasi kebijakan, konsistensi pelaksanaan, serta pengawasan dari pemerintah (Noor *et al.*, 2026; Ermawati dan Mutiara, 2024; Khariroh dan Yuana, 2023; Zahara *et al.*, 2025; Handayani *et al.*, 2021). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan e-retribusi melibatkan semua elemen dari implementor, pelaksana, kelompok sasaran, serta sistem digital yang digunakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif dan pengalaman subjek penelitian dalam konteks alamiah (Nani, 2020). Pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan implementasi sistem e-retribusi pada Pasar Sayur di Kabupaten Magetan, termasuk proses pelaksanaan kebijakan, hasil implementasi, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara terstruktur dan semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi e-retribusi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan, alur kerja, dan interaksi antar pelaksana. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen dan laporan pembukuan retribusi serta mendukung triangulasi data guna meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi

Pasar Sayur Magetan merupakan pasar tradisional yang berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Sukowinangun, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pasar ini berdiri pada tahun 1975 dan dibangun pada tahun 1988. Pasar Sayur Magetan menjadi pasar induk dan penyumbang PAD terbesar, serta menjadi sentra perdagangan komoditas sayur-mayur di Kabupaten Magetan. Aktivitas perdagangan meliputi penjualan skala besar oleh pengepul dan skala kecil oleh pengecer. Luas lahan 38.176 m², jumlah pedagang sekitar 2.231 orang, dan beroperasi selama 24 jam setiap hari. (Disperindag, 2026).

Pengelolaan Pasar Sayur Magetan berada di bawah Disperindag Kabupaten Magetan melalui Bidang Pasar, sesuai dengan Perbub No 6 2025. Operasional pasar dikoordinasikan oleh pengelola pasar yang membawahi lima bidang, yaitu administrasi dan keuangan, ketertiban dan keamanan, pemeliharaan dan sanitasi, pelayanan pasar, serta pelayanan pelanggan, promosi, dan pengembangan komunitas. Struktur pengelolaan ini berperan penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan pelaksanaan pemungutan retribusi (Disperindag, 2026).



Hasil Penelitian

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan publik dapat dianalisis melalui indikator sebagai berikut :

Komunikasi

Indikator komunikasi dalam kebijakan publik berkaitan langsung dengan proses penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat untuk membangun pemahaman, penerimaan, dan dukungan melalui pesan yang jelas, informasi yang terbuka, serta umpan balik masyarakat (Dunn, 2022).

Dapat dilihat dalam komunikasi implementasi e-retribusi berjalan cukup baik. Informasi disalurkan secara berjenjang dari dinas kepada pengelola dan petugas pasar, kemudian diteruskan kepada pedagang. Sosialisasi, pendampingan, prosedur, dan petunjuk teknis membantu pelaksana maupun kelompok sasaran memahami mekanisme pembayaran. Kejelasan prosedur juga membantu membangun persepsi yang relatif sama mengenai pelaksanaan kebijakan.

Namun, transmisi informasi belum sepenuhnya merata. Sebagian pedagang mengalami kesulitan memahami mekanisme digital, terutama karena perbedaan kemampuan dan faktor usia. Perubahan sistem dari mekanisme sebelumnya menuju QRIS juga menuntut penyesuaian informasi dan kebiasaan. Dengan demikian, indikator komunikasi telah tersedia, tetapi efektivitasnya perlu diperkuat melalui penyampaian berulang, bahasa yang mudah dipahami, dan pendampingan langsung bagi pedagang yang membutuhkan.

Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan kapasitas individu dalam mengembangkan potensi diri secara adaptif dan inovatif untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan (Benjamin Bukit et al., 2017), sedangkan menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh ketersediaan sumber daya yang memadai agar pelaksana dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Indikator sumber daya dinilai cukup baik, tetapi belum optimal. Implementasi ditopang oleh petugas yang menjalankan pemungutan, fasilitas komputer dan jaringan internet, pemantauan penerimaan melalui CSS Bank Jatim, serta pencatatan daring menggunakan Google Sheet. Mekanisme tersebut membantu proses pengecekan transaksi dan pencocokan penerimaan dengan pembukuan.

Kendala utama berkaitan dengan kesenjangan literasi digital pedagang, keterbatasan sarana pendukung dan jangkauan jaringan, sistem teknologi yang belum terintegrasi dalam satu aplikasi khusus, serta keterbatasan anggaran. Serta tidak semua pedagang dapat melakukan pembayaran secara mandiri. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sarana digital perlu disertai penguatan kapasitas pengguna, jaringan yang lebih merata, dan pengembangan sistem yang terintegrasi.

Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan perilaku pelaksana kebijakan yang tercermin melalui dukungan atau penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan, sehingga diperlukan pemberian motivasi dan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Handayani *et al.*, 2021).

Indikator disposisi menjadi faktor pendukung implementasi. Pelaksana menunjukkan sikap dan komitmen positif dalam menjalankan kebijakan serta membantu pedagang yang mengalami kesulitan bertransaksi. Pedagang juga menunjukkan respons yang cenderung menerima kebijakan. Sikap positif tersebut tidak serta-merta berarti seluruh pedagang telah



mampu menggunakan QRIS secara mandiri. Keterbatasan keterampilan digital masih membuat sebagian pedagang membutuhkan pendampingan.

Oleh karena itu, komitmen pelaksana perlu dipertahankan sekaligus diarahkan untuk membangun kemampuan pedagang secara bertahap, sehingga bantuan petugas dapat menjadi sarana pembelajaran dan bukan ketergantungan permanen.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berperan penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan, karena tata kelola yang terorganisasi dengan baik dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan, sedangkan struktur yang tidak teratur berpotensi menghambat pencapaian tujuan (Handayani *et al.*, 2021).

Indikator struktur birokrasi dinilai berjalan baik. Pelaksanaan e-retribusi telah memiliki SOP dan petunjuk teknis. Pembagian tugas dan kewenangan antar aktor relatif jelas, sedangkan koordinasi berlangsung di antara dinas, pengelola pasar, petugas pungut, dan pihak terkait. Mekanisme tersebut memberi arah pelaksanaan kebijakan.

Pengawasan juga didukung oleh sistem digital. Penerimaan dapat dipantau melalui CSS Bank Jatim, sementara pencatatan identitas pedagang, tarif, tunggakan, dan pembayaran dilakukan melalui Google Sheet. Pengawasan berjenjang membantu mencocokkan transaksi dengan pembukuan dan menjaga proses tetap tertib. Meski demikian, karena sistem pembayaran dan pencatatan belum terintegrasi sepenuhnya pada satu aplikasi, konsistensi input data dan koordinasi tetap penting untuk menjaga keandalan informasi.

SIMPULAN

Indikator komunikasi pada Implementasi Sistem E-Retribusi pada Pasar Sayur di Kabupaten Magetan berjalan dan didukung oleh komunikasi yang cukup baik, melalui sosialisasi, penyampaian informasi secara berjenjang, dan pendampingan kepada pedagang. Namun, efektivitas komunikasi masih perlu ditingkatkan karena perbedaan literasi digital dan usia menyebabkan informasi belum sepenuhnya dipahami secara merata.

Indikator sumber daya berjalan cukup baik melalui ketersediaan sumber daya manusia, sarana teknologi, dan sistem pemantauan telah mendukung pelaksanaan e-retribusi, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Kendala literasi digital, keterbatasan sarana dan jaringan, belum terintegrasinya sistem, serta keterbatasan anggaran untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Indikator disposisi menunjukkan hasil yang baik, berupa sikap dan komitmen positif dari pelaksana serta penerimaan manfaat menjadi faktor pendukung implementasi e-retribusi di Pasar Sayur Magetan. Meskipun demikian, pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan tetap diperlukan agar pedagang semakin mandiri dalam menggunakan sistem pembayaran digital.

Indikator Struktur Birokrasi dalam implementasi e-retribusi telah berjalan cukup baik melalui keberadaan SOP, pembagian tugas yang jelas, koordinasi antaraktor, dan pengawasan berjenjang. Namun, belum terintegrasinya sistem pembayaran dan pencatatan dalam satu aplikasi menuntut peningkatan koordinasi serta konsistensi pengelolaan data agar pelaksanaan kebijakan lebih efektif dan akuntabel.

Saran

Saran dari hasil penelitian ini berfokus pada peningkatan aspek sumber daya melalui penguatan literasi digital pedagang agar mampu melaksanakan pembayaran e-retribusi secara mandiri, perluasan jangkauan jaringan internet untuk memastikan akses yang merata, serta pengembangan aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung proses transaksi, pembukuan, dan



pelaporan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan e-retribusi secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aullia, K. M. (2024). Implementasi Kebijakan Program E-Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022-2024 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Balitar).
- Handayani, Y., Ariany, R., & Ameliza, K. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan ERetribusi Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*.
- Noor, T. W., Munawwarah, N. W., & Handayani, Y. F. (2026). Implementasi Digitalisasi Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar melalui E-Retribusi pada pasar Klandasan di Kota Balikpapan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 756-761.
- Khariroh, S., & Yuana, Y. (2023, February). Implementation of the e-retribution system in the wholesale market for vegetables, fruit and food commodities Pare district of Kediri. In *Prosiding Seminar* (pp. 75-81).
- Mutiara, Nisa dan Ernawati Dian. (2024). Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang dari E-Retribusi Pasar di Pasar Kanigoro Kabupaten Blitar. *Jurnal Otonoi*. Vol. 24, Nomor 1, Edisi April. *Jurnal Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*. Vol. 6, No. 2.
- Nursalim. (2017). Implementasi Kebijakan tentang Pemungutan Retribusi Pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya. Universitas Galuh Ciamis.
- Prabowo, I. C., & Marwah, S. K. (2023). The Determinants Of A Successful Implementation Of E-Retribution Payment System: Evidence From Sliipi Market Of Jakarta. *Journal of Applied Finance and Accounting*, 10(2).
- Pramana, Novalius Nanda dan Putri Robiatul Adawiyah. (2016). Implementasi Kebijakan E-Retribusi Tradisional di Pasar Patrang Kabupaten Jember. *Jurnal Fakiltas Ilmu Sosial dan Politik*.
- Pramesti, E. I. (2023). Implementasi Kebijakan Program E-Retribusi Pasar Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Di Kabupaten Sidoarjo. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, 3(1), 50-66.
- Pangarso, Agung. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Publik Digital Pembayaran E-Retribusi Rumah Susun Sewa di Kabupaten Semarang.

Peraturan Pemerintah

- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
- Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/134/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Magetan.